

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SEM-PLS, penelitian ini membuktikan bahwa tekanan eksternal dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan Pemerintah Kota Blitar, sedangkan ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif terhadap transparansi laporan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin kuat tekanan dari regulator, auditor, dan masyarakat serta semakin efektif sistem pengendalian internal yang diterapkan, maka semakin tinggi tingkat transparansi laporan keuangan yang dihasilkan. Sebaliknya, kondisi lingkungan yang tidak pasti menyebabkan aparatur menghadapi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan secara optimal sehingga transparansi cenderung menurun

Penelitian ini juga membuktikan bahwa religiusitas berperan sebagai variabel moderasi. Religiusitas memperkuat pengaruh tekanan eksternal dan pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan serta memperlemah dampak negatif ketidakpastian lingkungan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai religius seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab mendorong aparatur tidak hanya memenuhi tuntutan formal organisasi, tetapi juga menjalankan pengelolaan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab moral sehingga transparansi laporan keuangan dapat diwujudkan secara lebih substantif.

Dengan demikian, transparansi laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme organisasi berupa tekanan eksternal dan sistem pengendalian internal, tetapi juga oleh kualitas nilai internal aparatur yang tercermin melalui religiusitas. Oleh karena itu, peningkatan transparansi perlu dilakukan melalui penguatan tata kelola organisasi yang disertai pengembangan integritas dan nilai-nilai etika aparatur. Hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama sebagai berikut.

1. Tekanan Eksternal Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Transparansi Laporan Keuangan (H1 Diterima).

Tekanan eksternal yang bersumber dari pengawasan BPK/BPKP, regulasi pemerintah pusat, DPRD, masyarakat, dan media massa terbukti secara positif dan signifikan meningkatkan transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Kota Blitar ($\beta = 0,298$; $p = 0,000$). Temuan ini mendukung teori institusional yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah merespons tekanan lingkungan institusionalnya dengan meningkatkan standar pelaporan demi mempertahankan legitimasi. Intensitas pengawasan eksternal yang tinggi — khususnya dari BPK yang secara rutin melakukan pemeriksaan keuangan — terbukti efektif mendorong aparatur untuk meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural organisasi, seperti tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan pengendalian internal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor individual berupa religiusitas aparatur. Oleh

karena itu, upaya peningkatan transparansi perlu dilakukan secara seimbang melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan efektivitas pengendalian internal, serta pembangunan budaya organisasi yang berlandaskan integritas dan nilai-nilai etika

2. Ketidakpastian Lingkungan Berpengaruh Negatif dan Signifikan terhadap Transparansi Laporan Keuangan (H2 Diterima).

Ketidakpastian lingkungan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan ($\beta = -0,231$; $p = 0,002$). Dalam konteks Kota Blitar yang sangat bergantung pada transfer DAU/DAK (>70% pendapatan daerah), fluktuasi kebijakan fiskal pusat dan ketidakprediktabilan alokasi transfer secara sistemik menghambat kemampuan aparatur dalam menyusun laporan keuangan yang konsisten dan transparan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan basis PAD sebagai strategi jangka menengah untuk mengurangi eksposur terhadap ketidakpastian lingkungan.

3. Pengendalian Internal Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Transparansi Laporan Keuangan (H3 Diterima).

Pengendalian internal (SPIP) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan dengan koefisien jalur terbesar di antara seluruh variabel prediktor ($\beta = 0,312$; $p = 0,000$; $f^2 = 0,219$). Temuan ini menegaskan bahwa implementasi kelima komponen SPIP yang efektif lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan merupakan prasyarat utama transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Investasi dalam penguatan SPIP

merupakan strategi kebijakan yang paling *cost-effective* untuk meningkatkan transparansi.

4. Religiusitas Memoderasi Pengaruh Tekanan Eksternal terhadap Transparansi Laporan Keuangan (H4 Diterima).

Religiusitas terbukti memperkuat pengaruh positif tekanan eksternal terhadap transparansi laporan keuangan (β interaksi = 0,198; $p = 0,004$). Aparatur dengan religiusitas tinggi merespons tekanan eksternal secara lebih substantif karena motivasi transparansinya didorong oleh internalisasi nilai *shidq* (kejujuran) dan *amanah* (kepercayaan), tidak sekadar kepatuhan formal terhadap tuntutan eksternal. Temuan ini mengkonfirmasi kerangka teori *stewardship* dalam konteks aparatur pemerintah daerah di Indonesia.

5. Religiusitas Memoderasi Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap Transparansi Laporan Keuangan (H5 Diterima).

Religiusitas terbukti memperlemah (*buffer*) dampak negatif ketidakpastian lingkungan terhadap transparansi laporan keuangan (β interaksi = 0,167; $p = 0,016$). Internalisasi nilai agama — khususnya konsep *muraqabah* (kesadaran selalu diawasi Allah SWT) — berfungsi sebagai kendali perilaku internal yang menjaga integritas dan konsistensi pelaporan aparatur bahkan dalam kondisi ketidakpastian lingkungan yang tinggi. Temuan ini merupakan kontribusi empiris yang relatif baru dalam literatur akuntansi sektor publik Indonesia.

6. Religiusitas Memoderasi Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan (H6 Diterima).

Religiusitas terbukti memperkuat pengaruh positif pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan (β interaksi = 0,214; $p = 0,002$). Religiusitas berfungsi sebagai katalisator yang memaksimalkan efektivitas SPIP dengan mendorong aparaturnya menjalankan setiap komponen pengendalian berdasarkan nilai *mas'uliyah* (tanggung jawab moral), tidak sekadar kewajiban prosedural. Temuan ini mengkonfirmasi proposisi bahwa sistem pengendalian formal hanya dapat mencapai efektivitas penuh apabila didukung oleh SDM yang berintegritas dan memiliki motivasi intrinsik yang kuat.

Secara keseluruhan, model penelitian ini mampu menjelaskan 67,3% varians transparansi laporan keuangan ($R^2 = 0,673$), yang menunjukkan bahwa integrasi teori institusional dan teori stewardship dalam satu kerangka analisis komprehensif dengan religiusitas sebagai moderator memberikan penjelasan yang lebih kaya dan lengkap dibandingkan studi-studi sebelumnya yang hanya menggunakan salah satu kerangka teori.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara terbuka demi menjaga integritas ilmiah dan memberikan konteks yang tepat bagi interpretasi temuan.

Pertama, desain cross-sectional. Penelitian ini menggunakan pendekatan *cross-sectional* yang mengumpulkan data pada satu titik waktu (Maret–April 2026), sehingga tidak dapat menangkap dinamika perubahan transparansi laporan keuangan secara longitudinal. Hubungan kausal yang ditemukan bersifat kondisional pada periode pengumpulan data dan mungkin berubah seiring

perubahan kondisi lingkungan fiskal, kepemimpinan, atau regulasi. Inferensi kausalitas yang kuat memerlukan desain longitudinal atau eksperimental.

Kedua, bias kuesioner berbasis persepsi. Data dikumpulkan melalui kuesioner *self-report* berbasis persepsi, sehingga rentan terhadap beberapa jenis bias respons. Bias sosial (*social desirability bias*) menjadi perhatian utama, terutama untuk variabel religiusitas yang bersifat sensitif secara personal: responden mungkin memberikan jawaban yang terkesan lebih religius dari kondisi aktualnya. Selain itu, *common method bias* (CMB) berpotensi muncul karena variabel prediktor dan variabel endogen diukur dari sumber yang sama (responden yang sama). Meskipun pengujian VIF telah dilakukan untuk mendeteksi CMB secara statistik, penggunaan sumber data yang berbeda (*multi-source design*) tetap disarankan untuk penelitian mendatang.

Ketiga, keterbatasan generalisasi. Penelitian ini terbatas pada 27 OPD Pemerintah Kota Blitar, yang merupakan kota kecil dengan karakteristik fiskal yang sangat spesifik: ketergantungan ekstrem pada transfer pusat dan PAD yang terbatas. Generalisasi temuan ke pemerintah kota/kabupaten dengan karakteristik berbeda — misalnya kota besar dengan PAD dominan atau daerah yang baru mendapat predikat WTP — perlu dilakukan dengan kehati-hatian yang tinggi.

Keempat, konstruk religiusitas berbasis Islam. Konstruk religiusitas dalam penelitian ini dikembangkan dalam konteks nilai-nilai Islam sebagai agama mayoritas di Kota Blitar (>95% penduduk). Dimensi-dimensi yang diukur (akidah, ibadah, akhlak, muamalah, ihsan) merupakan konsep yang spesifik dalam kerangka teologis Islam. Penerapan instrumen yang sama pada populasi dengan komposisi

agama yang lebih beragam perlu diadaptasi secara substansial, baik dalam item pertanyaan maupun dalam interpretasi hasilnya.

Kelima, absensi data objektif transparansi. Variabel transparansi laporan keuangan dalam penelitian ini diukur berdasarkan persepsi aparatur, bukan berdasarkan indikator objektif eksternal seperti skor indeks transparansi LKPD (dari FITRA atau LSM pengawas), jumlah temuan BPK, atau tingkat akses publik terhadap dokumen keuangan. Penggunaan ukuran transparansi berbasis persepsi ini memiliki keunggulan dalam menangkap dimensi substantif transparansi, tetapi juga memiliki kelemahan dalam objektivitas dan verifiabilitas.

5.3. Implikasi Penelitian

5.3.1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi teoritis yang signifikan terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya dalam konteks pemerintah daerah Indonesia.

Pertama, integrasi teori institusional dan teori stewardship. Penelitian ini berhasil mengintegrasikan teori institusional (Scott, 2022) dan teori *stewardship* (Davis *et al.*, 2014) dalam satu model penelitian yang koheren. Integrasi ini menghasilkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dibandingkan studi-studi sebelumnya yang hanya menggunakan satu perspektif teoritis. Secara khusus, penelitian ini membuktikan bahwa faktor eksternal (tekanan institusional dari lingkungan) dan faktor internal (nilai religius individu) bekerja secara sinergis, bukan saling menggantikan, dalam menentukan tingkat transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Kedua, religiusitas sebagai moderator kontekstual. Penelitian ini memberikan bukti empiris pertama bahwa religiusitas berperan signifikan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara determinan organisasional (tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, pengendalian internal) dengan transparansi laporan keuangan pada konteks pemerintah daerah di Indonesia. Temuan ini sekaligus menyelesaikan inkonsistensi hasil penelitian Pebriani *et al.* (2021) dengan menunjukkan bahwa efek moderasi religiusitas bersifat kontekstual: lebih kuat pada lingkungan birokrasi yang heterogen (pemerintah daerah) dibandingkan lembaga yang secara institusional telah menginkorporasikan religiusitas (PTKIN).

Ketiga, religiusitas sebagai buffer terhadap ketidakpastian. Bukti empiris mengenai pengaruh negatif ketidakpastian lingkungan yang dimoderasi secara positif oleh religiusitas memberikan kontribusi pada pengembangan teori kontinjensi dalam akuntansi sektor publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel nilai individu (dalam hal ini religiusitas) dapat berfungsi sebagai *buffer* yang melindungi integritas perilaku pelaporan dari dampak negatif kondisi lingkungan yang tidak pasti. Ini membuka jalur penelitian baru yang mempertimbangkan karakteristik individual — tidak hanya faktor organisasional dan lingkungan — sebagai determinan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Keempat, kontribusi metodologis. Penggunaan prosedur *product indicator approach* untuk pengujian moderasi dengan variabel laten (Hair *et al.*, 2022) dalam konteks PLS-SEM menghasilkan estimasi koefisien interaksi yang lebih akurat dibandingkan pendekatan *mean-split* atau subgroup analysis yang umum digunakan dalam studi-studi akuntansi sektor publik terdahulu. Pendekatan

ini dapat menjadi referensi metodologis bagi peneliti lain yang akan mengkaji efek moderasi dalam konteks serupa.

5.3.2. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal serta membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai integritas dan religiusitas. Upaya tersebut penting dilakukan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan diantaranya:

Bagi Pemerintah Kota Blitar:

(1) **Intensifikasi reвью SPIP berkala.** Mengingat pengendalian internal terbukti sebagai prediktor terkuat transparansi laporan keuangan ($\beta = 0,312$; $f^2 = 0,219$), pimpinan Pemerintah Kota Blitar perlu mengintensifkan reвью internal SPIP secara berkala di seluruh 27 OPD, setidaknya setiap semester. Reвью harus bersifat substantif dan mencakup evaluasi menyeluruh atas kelima komponen SPIP, tidak sekadar aspek dokumentasi formal. Hasil reвью perlu ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan yang spesifik, terukur, dan terikat waktu.

(2) **Strategi mitigasi ketidakpastian anggaran.** Untuk mengurangi dampak negatif ketidakpastian lingkungan terhadap transparansi pelaporan, Pemerintah Kota Blitar perlu mengembangkan strategi mitigasi risiko fiskal yang lebih komprehensif. Strategi ini dapat mencakup: (a) pembentukan dana cadangan fiskal untuk mengantisipasi fluktuasi DAU/DAK, (b) penyusunan skenario APBD alternatif (optimistis, moderat, pesimistis) berdasarkan proyeksi transfer pusat yang

bervariasi, dan (c) pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk mendeteksi potensi perubahan kebijakan fiskal pusat yang signifikan.

(3) **Program penguatan PAD.** Merancang dan mengimplementasikan program peningkatan PAD secara terstruktur untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat dalam jangka menengah (5–10 tahun). Diversifikasi sumber PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pengembangan BUMD, dan kerjasama investasi swasta akan mengurangi eksposur terhadap ketidakpastian lingkungan dan secara tidak langsung meningkatkan kapasitas transparansi pelaporan keuangan.

Bagi Manajemen SDM dan Pengembangan Aparatur:

Mengintegrasikan program penguatan nilai-nilai integritas berbasis agama dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis keuangan daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa religiusitas yang terinternalisasi secara mendalam berkontribusi nyata terhadap perilaku transparansi aparatur, sehingga program pembinaan spiritual yang substantif — bukan sekadar formal dan seremonial — perlu menjadi komponen tetap dalam pengembangan kompetensi aparatur pengelola keuangan. Program ini dapat berupa: kajian etika keuangan berbasis nilai agama, integrasi spiritualitas dalam diklat SPIP, atau pembentukan komunitas integritas aparatur berbasis nilai keagamaan.

Bagi BPK/BPKP dan Inspektorat Daerah:

Mempertahankan dan meningkatkan intensitas serta kualitas pengawasan dan pendampingan terhadap Pemerintah Kota Blitar, khususnya dalam aspek implementasi SPIP. Mengingat tekanan eksternal terbukti berpengaruh positif

signifikan terhadap transparansi, konsistensi pengawasan eksternal merupakan faktor kritikal yang tidak boleh dikurangi. BPKP khususnya perlu meningkatkan peran pendampingan teknis (*consulting*) yang bersifat kapasitas-membangun, tidak hanya peran pengawasan yang bersifat *assurance*, sehingga terjadi transfer pengetahuan dan kompetensi yang lebih efektif kepada aparaturnya keuangan daerah.

Bagi DPRD Kota Blitar:

Meningkatkan kapasitas teknis anggota DPRD dalam fungsi pengawasan keuangan daerah, agar tekanan yang diberikan tidak bersifat politis semata tetapi substansial dan berbasis analisis keuangan yang mendalam. DPRD perlu membekali anggotanya dengan pemahaman yang memadai tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP), indikator transparansi fiskal, dan teknik pembacaan laporan keuangan daerah. Intensifikasi rapat dengar pendapat (RDP) yang berfokus pada substansi laporan keuangan — bukan hanya pada realisasi program — akan meningkatkan efektivitas tekanan DPRD dalam mendorong transparansi.

5.4. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan dan temuan penelitian ini, beberapa saran disampaikan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan kajian ini lebih lanjut.

Pertama, desain longitudinal. Penelitian selanjutnya sangat disarankan untuk menggunakan desain *longitudinal* dengan mengumpulkan data pada minimal dua titik waktu yang berbeda (misalnya sebelum dan sesudah pergantian kepala daerah, atau sebelum dan sesudah implementasi sistem informasi keuangan baru). Desain ini akan memungkinkan pengujian stabilitas hubungan kausal yang

ditemukan dan pendeteksian efek dinamis yang tidak dapat ditangkap oleh penelitian *cross-sectional*.

Kedua, multi-source data. Untuk mengatasi keterbatasan *self-report bias* dan *common method bias*, penelitian mendatang disarankan mengkombinasikan data kuesioner dengan data sekunder objektif. Data sekunder yang relevan antara lain: skor indeks transparansi LKPD dari lembaga independen (FITRA, ICW), jumlah dan nilai temuan BPK, skor Monitoring Centre for Prevention (MCP) dari KPK, atau hasil penilaian SPIP oleh BPKP. Triangulasi antara data primer persepsi dan data sekunder objektif akan menghasilkan kesimpulan yang lebih robust dan dapat dipercaya.

Ketiga, replikasi lintas daerah. Replikasi penelitian ini pada pemerintah kota/kabupaten dengan karakteristik fiskal yang berbeda akan sangat bermanfaat untuk menguji generalisabilitas temuan. Beberapa perbandingan yang menarik antara lain: (a) kota besar dengan PAD dominan vs. kota kecil dengan ketergantungan transfer tinggi, (b) daerah dengan sejarah WTP panjang vs. daerah yang baru pertama mendapat WTP, atau (c) daerah dengan skor SPIP tinggi vs. rendah berdasarkan penilaian BPKP.

Keempat, variabel tambahan. Penelitian selanjutnya dapat memperkaya model dengan menambahkan variabel-variabel yang secara konsisten relevan dalam literatur akuntansi sektor publik, seperti: kompetensi SDM keuangan (latar belakang pendidikan akuntansi, pengalaman, sertifikasi), komitmen organisasi, kepemimpinan transformasional, kualitas sistem informasi keuangan daerah (SIPD/SIMDA), atau budaya organisasi. Penambahan variabel-variabel ini akan

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang determinan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Kelima, pengembangan instrumen religiusitas inklusif.

Mengembangkan instrumen religiusitas yang lebih inklusif dan dapat diterapkan pada populasi multi-agama akan memperluas cakupan dan generalisabilitas penelitian serupa. Hal ini dapat dilakukan melalui adaptasi konsep-konsep universal religiusitas (seperti *belief*, *practice*, *experience*, *knowledge* dari Glock & Stark, 1965) yang dapat disesuaikan dengan berbagai tradisi agama, sehingga penelitian tentang peran religiusitas dalam akuntansi sektor publik tidak terbatas pada konteks umat Islam semata.

Keenam, analisis tingkat OPD. Penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis pada tingkat OPD (unit analisis = OPD, bukan individu) dengan mempertimbangkan faktor-faktor tingkat OPD seperti besaran anggaran, kompleksitas program, rotasi pejabat keuangan, dan hasil penilaian SPIP per-OPD. Analisis multilevel (*multilevel modeling*) yang secara simultan mempertimbangkan faktor individu dan faktor OPD akan menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap tentang determinan transparansi laporan keuangan.